



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG



Rencana Kerja (RENJA)

PERUBAHAN

Tahun 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN	KATA PENGANTAR ... I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
3.3 Program dan Kegiatan.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	71
BAB V PENUTUP	82
LAMPIRAN	
Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/ dinas untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan secara terperinci sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam periode 4 tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun RPD tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijabarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang sebagai SKPD dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Singkawang tahun 2023-2026 yang selanjutnya diuraikan secara terperinci kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Singkawang.

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra Bappeda Kota Singkawang 2023-2026. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang tahun 2023 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan pada Bappeda Kota Singkawang pada tahun anggaran 2023 menjadi suatu keharusan dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Singkawang tahun anggaran 2023.

Selanjutnya diharapkan semua komponen aparatur di Bappeda Kota Singkawang serta semua pihak yang berkepentingan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dapat memanfaatkan Renja Bappeda Kota Singkawang 2023 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan tahun 2023.

Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kota Singkawang.

Singkawang, 03 Juli 2023
Pft. Kepala Bappeda Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197001051997031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD serta diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran dan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan daerah serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Singkawang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan serta melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda Kota Singkawang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kota Singkawang. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Oleh karenanya, Bappeda Kota Singkawang perlu menyusun acuan/ pedoman pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang selanjutnya dituangkan dalam Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja

- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

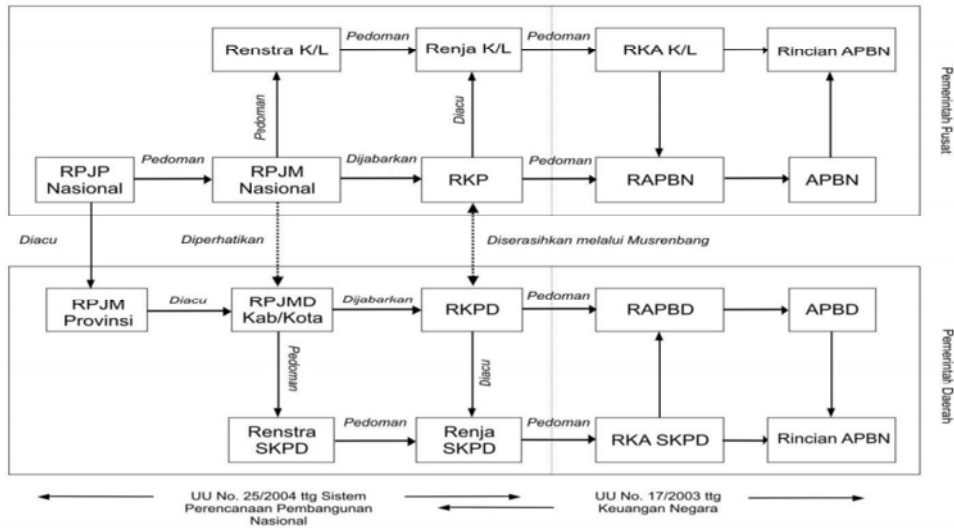
- Pengolahan data dan informasi.
- Analisis gambaran pelayanan OPD.
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD.
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

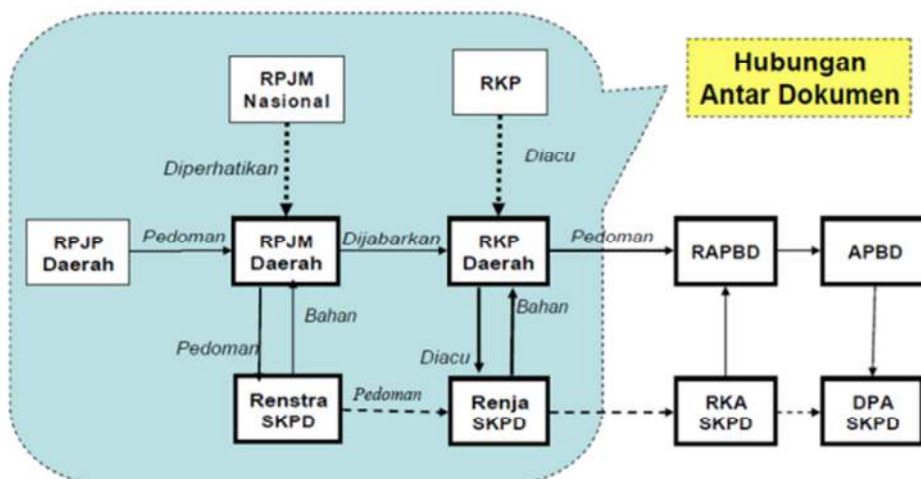
Skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini :



Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri Nomor 21 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan jangka menengah daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kota Singkawang Nomor 51)
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 118);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/496/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Bappeda Kota Singkawang tahun 2023 ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappeda Kota Singkawang tahun 2023.

Adapun tujuan umum penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Singkawang sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Singkawang;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
6. Mengoptimalkan peran fungsi perencanaan dalam pembangunan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun $n-2 = 2023-2 = 2021$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - d. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - e. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

4. Faktor-faktor Penyebab

- a. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Adanya tansisi perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Adanya refocusing anggaran pada beberapa program kegiatan dan sub kegiatan sehingga pelaksanaan rapat koordinasi menjadi terbatas
- b. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
 1. Adanya Komitmen bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.
 2. Berusaha Seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan yang direncanakan.

c. Faktor Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang capaiannya melebihi target maka dari itu tidak dapat disimpulkan faktor penyebabnya.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang Perlu Diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2021 dan Renstra 2018 – 2022.
2. Efisiensi alokasi belanja.
3. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target
4. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

Pembuatan *roadmap* untuk mencari permasalahan inti serta kebijakan yang *legitimate* atas pelimpahan wewenang perlu segera ditetapkan

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Rentra Bappeda s/d Tahun 2022

INSTANSI : PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 ALAMAT : JALAN PELITA NO 1 KOTA SINGKAWANG

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERENCANAAN			2020	2021	2021	2021	2022	2022	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	93 Orang	62 Orang	31 Orang	31 Orang	100	29 Orang	36 bulan	80
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Adminitrasi Keuangan Yang Disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	4 Dok	80
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu yang Diadakan	245 Stel	80 Stel	40 Stel	40 Stel	100	45 Stel	165 Stel	67
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang di adakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor Yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	15 Surat Kabar	6 Surat Kabar	3 Surat Kabar	3 Surat Kabar	100	3 Surat Kabar	12 Surat Kabar	80
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Yang dilaksanakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	Listrik	Daya Air, Internet dan Listrik yang disediakan								
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah PTT yang menerima gaji	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang di pelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang di rehabilitasi	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD								

5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan Anggaran	8 Dok	0	0	0	0	4 Dok	4 Dok	50
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20 Keg	0	0	0	0	10 Keg	10 Keg	50
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Forum OPD	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	4 Keg	80
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	4 Keg	80

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	25 Dok	10 Dok	5 Dok	5 Dok	100	5 Dok	20 Dok	804
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	8 Dok	80
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang dikumpulkan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	2 Keg	0	0	0	0	1 Keg	1 Keg	50
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan OPD yang Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan.								
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	16 Keg	0	0	0	0	8 Keg	8 Keg	50
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Kerjasama	2 Lap	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8 Dok	0	0	0	0	4 Dok	4 Dok	50
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
		Persentase Dokumen Perencanaan BidangInfrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan MANusia yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan								

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		RPJMD dan RKPD								
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
		Jumlah Rapat Koordinasi TKPK	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.01.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan OPD Bidang Ekonomi dan SDA yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Bidang Perekonomian								
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	20 Keg	0	0	0	0	10 Keg	10 Keg	50
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Kali	0	0	0	0	7 Kali	7 Kali	50
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Keg	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	26 Keg	0	0	0	0	13 Keg	13 Keg	50
5.01.02.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	14 Keg	0	0	0	0	7 Keg	7 Keg	50
		Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	14 Keg	0	0	0	0	7 Keg	7 Keg	50
5.01.02.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	8 Keg	0	0	0	0	4 Keg	4 Keg	50
		Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen atau Laporan Hasil Kegiatan yang difasilitasi	2 Lap	0	0	0	0	1 Lap	1 Lap	50
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan								

		Kependudukan								
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	6 Dok	0	0	0	0	3 Dok	3 Dok	50
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian Penataan Ruang dan Pertanahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen/Kajian Bidang Komunikasi dan Informatika	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Komunikasi								
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kajian di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	2 Dok	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	50
		Jumlah Pemenang Lomba Inovasi Daerah	6 Pemenang	0	0	0	0	3 Pemenang	3 Pemenang	50
5.05.02.2.02.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan dan/atau didiseminasikan	11 Hasil Kelitbangan	0	0	0	0	5 Hasil Kajian Kelitbangan	5 Hasil Kajian Kelitbangan	45

Pada tabel rekapitulasi hasil evaluasi diatas terdapat sejumlah target yang kecil sampai akhir tahun 2022, hal itu terjadi dikarenakan adanya Surat Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam rencana program dan kegiatan 2021 – 2022 pun mengalami perubahan. Sehingga ada sejumlah kegiatan yang baru muncul pada tahun 2021-2022.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Singkawang yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Inovasi Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Sedangkan Indikator Kinerja Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah
2. Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan tersebut dibawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	-	-		50%	55%	60%	65%	100%		100%	50%	
2.	Persentase nilai Sakip Komponen Perencanaan	-	-		22%	23%	24%	25%	100%		100%	22%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah Dan Persentase nilai Sakip Komponen Perencanaan. Pencapaian indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	%	50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase nilai Sakip Komponen Perencanaan	%	22

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria tinggi, dengan rata-rata target capaian 100 %

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
2. Belum Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja.
3. Belum optimalnya kualitas Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.
4. Belum Optimalnya Implementasi Perencanaan Sektoral dan berbasis Isu Strategis.

5. Belum optimalnya manajemen SDM berbasis teknologi informasi.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Kurang efisiennya pengelolaan kegiatan dan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja kelembagaan.
8. Belum optimalnya koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar Perangkat Daerah.
9. Belum optimalnya integrasi dan validitas data perencanaan pembangunan.
10. Adanya refocusing anggaran yang membuat beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya pagu dana.
11. Adanya beberapa sub kegiatan yang belum terakomodir didalam dokumen perencanaan

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

➤ Tantangan yang dihadapi :

- a. Mewujudkan penyusunan prioritas pembangunan dengan prinsip money follow program;
- b. Perumusan kebijakan berbasis riset;
- c. Mewujudkan sinergisitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;
- d. Pemenuhan persyaratan teknis untuk pengajuan usulan program dan kegiatan ke Pemerintah Kalimantan Barat dan Pemerintah pusat;
- e. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal pemerintah daerah maupun dengan Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah pusat;
- f. Mewujudkan sinergisitas kebijakan dan tatakala perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Kalimantan Barat dan Pemerintah pusat;
- g. Mensinergikan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah

- Peluang :
 - a. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran
 - b. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan
 - c. Kebijakan dari pemerintah pusat mengenai money follow program memberikan pedoman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana menentukan program prioritas beserta pagu anggarannya
 - d. Dengan penentuan program prioritas yang lebih focus dan sinkron dengan prioritas nasional dan provisi, akan memberikan kesempatan untuk meraih anggaran dari APBD Kalimantan Barat dan APBN Adanya anggaran keistimewaan

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- a. Optimalisasi manajemen kinerja dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;
- b. Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen perencanaan;
- c. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan serta konsultasi pada berbagai aspek yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah atau stakeholder terkait lainnya;
- d. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif,
- e. Optimalisasi penyelenggaraan program dan pembiayaan pembangunan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,

indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Pemerintah Kota Singkawang dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Singkawang terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Perbandingan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2023. Dimana Terkait masing masing OPD telah mendapatkan pagu maka ada program kegiatan yang berubah nilainya dan ada kegiatan yang tidak bisa dimasukkan dalam rencana kerja namun ada beberapa program baru yang diusulkan prioritas.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang merencanakan untuk melaksanakan 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan dan sub kegiatan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 7.485.602.278,00

Pagu Indikatif Bappeda mengalami penurunan sebesar Rp 401.164.834 ,00 Penurunan pagu indikatif diperubahan ini sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan.

Adapun hasil review rancangan awal RKPD Perubahan dengan analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tebal berikut :

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023 Bappeda Kota Singkawang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp7.117.752.544	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp7.117.752.544	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 69.071.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 69.071.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 18.096.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 18.096.000	
	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 10.195.000	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 10.195.000	
	Koordinasi dan Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10.195.000	Koordinasi dan Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10.195.000	
	Koordinasi Penyusun DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 10.195.000	Koordinasi Penyusun DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 10.195.000	
	Koordinasi dan Penyusun Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10.195.000	Koordinasi dan Penyusun Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10.195.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 10.195.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 10.195.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	Rp -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	Rp -	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp3.466.197.786	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp3.466.197.786	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	Rp3.196.220.786	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	Rp3.196.220.786	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ASN	1 Dokumen	Rp 265.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ASN	1 Dokumen	Rp 265.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Rp -	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Pelaksaaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Pelaksaaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 4.977.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 4.977.000	
	Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Rp -	Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Rp -	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Rp -
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Rp -	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Rp -
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	Rp 41.131.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	Rp 41.131.000
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 4.883.000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 4.883.000
	Pengamanan barang milik daerah SKPD		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	0 Dokumen	Rp -	Pengamanan barang milik daerah SKPD		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	0 Dokumen	Rp -
	Koordinasi dan penilaian barang milik Daerah SKPD		Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi barang milik daerah SKPD	1 Laporan	Rp 22.397.000	Koordinasi dan penilaian barang milik Daerah SKPD		Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi barang milik daerah SKPD	1 Laporan	Rp 22.397.000
	Pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp -	Pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp -
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 4.617.000	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 4.617.000
	Penatausahaan Barang milik daerah SKPD		Jumlah laporan Penatausahaan Barang milik daerah SKPD	1 Laporan	Rp 9.234.000	Penatausahaan Barang milik daerah SKPD		Jumlah laporan Penatausahaan Barang milik daerah SKPD	1 Laporan	Rp 9.234.000
	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD		Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	0 Dokumen	Rp -	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD		Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	0 Dokumen	Rp -

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelayanan admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 88.584.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelayanan admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 88.584.000	
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Rp -	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Rp -	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	Rp 88.584.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	Rp 88.584.000	
	Pendataan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelohan Adminitrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Rp -	Pendataan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelohan Adminitrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Rp -	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaiian		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Rp -	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaiian		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Rp -	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp1.972.165.865	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp1.972.165.865	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Rp 20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Rp 20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 150.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Rp 24.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Rp 24.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.930.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.930.900	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	1 Paket	Rp 20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	1 Paket	Rp 20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 4.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 4.680.000
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp 9.995.500	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp 9.995.500
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 20.975.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 20.975.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp1.711.584.465	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp1.711.584.465
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	0 Dokumen	Rp -	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	0 Dokumen	Rp -
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	Rp -	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	Rp -
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 318.280.350	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 318.280.350
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	0 Unit	Rp -
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp -

	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	Rp 10.961.250	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	Rp 10.961.250
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -
	Pengadaan Aset Tak Terwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Pengadaan Aset Tak Terwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Rp -
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 307.319.100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 307.319.100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 802.459.290	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 802.459.290
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 174.974.637	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 174.974.637

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralataan dan Perlengkapn Kantor Yang Disediakan	0 Laporan	Rp -	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralataan dan Perlengkapn Kantor Yang Disediakan	0 Laporan	Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	Rp 626.984.653	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	Rp 626.984.653
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 359.863.253	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 359.863.253
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan pajaknya	4 Unit	Rp 86.822.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan pajaknya	4 Unit	Rp 86.822.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	0 Unit	Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	0 Unit	Rp -
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	Rp -
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Dipelihara	0 Unit	Rp -	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Dipelihara	0 Unit	Rp -
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Rp -	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Rp -
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	0 Unit	Rp -	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	0 Unit	Rp -

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	Pemeliharaan Aset Tak Terwujud		Jumlah Aset Tak Terwujud Yang Dipelihara	0 Unit	Rp -	Pemeliharaan Aset Tak Terwujud		Jumlah Aset Tak Terwujud Yang Dipelihara	0 Unit	Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	0 Unit	Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	0 Unit	Rp -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	Rp 42.135.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	Rp 42.135.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	Rp 230.906.253	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	Rp 230.906.253
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	Rp 389.993.252	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	Rp 389.993.252
10	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	Rp 286.960.692	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	Rp 286.960.692
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0 Dokumen	Rp -	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0 Dokumen	Rp -
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah	1 Dokumen	Rp 46.156.376	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah	1 Dokumen	Rp 46.156.376
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Rp 77.769.176	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Rp 77.769.176

	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	0 Berita Acara	Rp -	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	0 Berita Acara	Rp -
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Rp 45.060.840	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Rp 45.060.840
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0 Usulan	Rp -	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0 Usulan	Rp -
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Rp 117.974.300	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Rp 117.974.300
11	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Rp 9.415.380	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Rp 9.415.380
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Rp 9.415.380	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Rp 9.415.380
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Orang yang Dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi SKPD	0 Orang	Rp -	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Orang yang Dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi SKPD	0 Orang	Rp -
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Ditertibkan	0 Buku	Rp -	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Ditertibkan	0 Buku	Rp -
12	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Rp 93.617.180	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Rp 93.617.180

	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	Rp -	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	Rp -
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerjasama Daerah yang Koordinasikan Pelaksanaan	0 Kerja Sama	Rp -	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerjasama Daerah yang Koordinasikan Pelaksanaan	0 Kerja Sama	Rp -
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Rp 93.617.180	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Rp 93.617.180
13	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang Pembangunan Daerah	Bappeda	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang Pembangunan Daerah	100%	Rp -	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang Pembangunan Daerah	Bappeda	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang Pembangunan Daerah	100%	Rp -
	Pengelolaan data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah		Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah yang dikelola	0 Dokumen	Rp -	Pengelolaan data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah		Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah yang dikelola	0 Dokumen	Rp -
	Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah		Jumlah dokumen hasil Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	0 Dokumen	Rp -	Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah		Jumlah dokumen hasil Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	0 Dokumen	Rp -
	Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp -	Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp -

	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	Rp 212.922.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	Rp 212.922.000	
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	Cakupan OPD Bidang Pemerintahan yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	Rp 79.931.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	Cakupan OPD Bidang Pemerintahan yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	Rp 79.931.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunanya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	2 Dokumen	Rp 10.090.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunanya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	2 Dokumen	Rp 10.090.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	Rp 10.759.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	Rp 10.759.000	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	9 Laporan	Rp 12.224.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	9 Laporan	Rp 12.224.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronasi Renstra/Renja Dengan RKPDP/RPJMD Pada Bidang Pemerintah	1 Laporan	Rp 6.210.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronasi Renstra/Renja Dengan RKPDP/RPJMD Pada Bidang Pemerintah	1 Laporan	Rp 6.210.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	Rp 14.224.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	Rp 14.224.000
	Asisten penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	Rp 10.744.000	Asisten penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	Rp 10.744.000
	Pelaksanaan monitoring dan avaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	Rp 7.840.000	Pelaksanaan monitoring dan avaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	Rp 7.840.000
	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonis perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		Jumlah laporan hasil sinkronasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	1 Laporan	Rp 7.840.000	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonis perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		Jumlah laporan hasil sinkronasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	1 Laporan	Rp 7.840.000
15	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Cakupan OPD Bidang Ekonomi dan SDA yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPDP	100%	Rp 59.981.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Cakupan OPD Bidang Ekonomi dan SDA yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPDP	100%	Rp 59.981.000

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Rp 4.829.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Rp 4.829.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	Rp 11.238.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	Rp 11.238.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	4 Perangkat Daerah	Rp 9.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	4 Perangkat Daerah	Rp 9.000.000	
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	1 Laporan	Rp 4.872.000	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	1 Laporan	Rp 4.872.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Rp 4.664.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Rp 4.664.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	Rp 12.218.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	Rp 12.218.000	

	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	Rp 10.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	Rp 10.000.000
	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		Jumlah laporan hasil sinkronasi Rensta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 Laporan	Rp 3.160.000	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		Jumlah laporan hasil sinkronasi Rensta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 Laporan	Rp 3.160.000
16	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bappeda	Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dokumenPerencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	Rp 73.010.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bappeda	Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dokumenPerencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	Rp 73.010.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Rp 13.267.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Rp 13.267.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	Rp 10.811.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	Rp 10.811.000
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	Rp 20.400.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	Rp 20.400.000
	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		Jumlah laporan hasil sinkronasi Rensta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 Laporan	Rp 5.006.000	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		Jumlah laporan hasil sinkronasi Rensta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 Laporan	Rp 5.006.000

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Rp 4.771.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Rp 4.771.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	Rp 7.627.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	Rp 7.627.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	Rp 8.600.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	Rp 8.600.000	
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPJMD pada bidang kewilayahan	1 Laporan	Rp 2.528.000	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPJMD pada bidang kewilayahan	1 Laporan	Rp 2.528.000	
	Penelitian Pengembangan		Persentase Penelitian Pengembangan	100%	Rp 376.626.000	Penelitian Pengembangan		Persentase Penelitian Pengembangan	100%	Rp 376.626.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	Rp 376.626.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	Rp 376.626.000	
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda	Adanya Peningkatan Capaian Kinerja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	Rp -	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda	Adanya Peningkatan Capaian Kinerja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	Rp -	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0 Laporan	Rp -	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0 Laporan	Rp -	

	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	0 Laporan	Rp -	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	0 Laporan	Rp -
	Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan		Jumlah laporan hasil Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan	0 Laporan	Rp -	Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan		Jumlah laporan hasil Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan	0 Laporan	Rp -
	Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang	0 Laporan	Rp -	Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang	0 Laporan	Rp -
18	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappeda	Adanya Peningkatan Capaian Kinerja pada Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	Rp 40.135.600	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappeda	Adanya Peningkatan Capaian Kinerja pada Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	Rp 40.135.600
	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek aspek sosial		Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan aspek-aspek sosial	1 Dokumen	Rp 40.135.600	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek aspek sosial		Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan aspek-aspek sosial	1 Dokumen	Rp 40.135.600
18	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappeda	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	Rp 105.990.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappeda	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	Rp 105.990.000
	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	0 Dokumen	Rp -	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	0 Dokumen	Rp -
	Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum	0 Dokumen	Rp -	Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum	0 Dokumen	Rp -
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Rp 105.990.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Rp 105.990.000
20	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappeda	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Komunikasi	100%	Rp 230.500.400	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappeda	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Komunikasi	100%	Rp 230.500.400
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Rp 167.435.200	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Rp 167.435.200

Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang fusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang fusi inovasi dan penerapan teknologi	0 Laporan	Rp -	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang fusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang fusi inovasi dan penerapan teknologi	0 Laporan	Rp -
Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	0 Laporan	Rp -	Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	0 Laporan	Rp -
Sosialisai dan disemilasi hasil-hasil kelitbangan		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisai dan disemilasi hasil-hasil kelitbangan	1 Laporan	Rp 40.565.200	Sosialisai dan disemilasi hasil-hasil kelitbangan		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisai dan disemilasi hasil-hasil kelitbangan	1 Laporan	Rp 40.565.200
Fasilitas hak kekayaan intelektual		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitas hak kekayaan intelektual	1 Laporan	Rp 22.500.000	Fasilitas hak kekayaan intelektual		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitas hak kekayaan intelektual	1 Laporan	Rp 22.500.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian kami padukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota dan Forum RKPD Kota. Dengan mempertimbangkan skala prioritas, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan Program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 dari para pemangku kepentingan di bidang perencanaan, dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023
Dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Singkawang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Catatan
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan umum penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Singkawang sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Singkawang;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;

Adapun tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Singkawang tahun 2023 selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kota Singkawang tahun 2023-2026, yang meliputi :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah Meningkatkan Akuntabilitas	Indeks Inovasi daerah	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah
2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan 4 (Empat) program, 20 (Tujuh belas) kegiatan, dan 117 (Lima Puluh

Empat) Sub Kegiatan . Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan.

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 117 (seratus tujuh belas) sub kegiatan. kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Program Prioritas Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 389.993.252	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 286.960.692	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp -	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp 46.156.376	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 77.769.176	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp -	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 45.060.840	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp	-	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	117.974.300	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	9.415.380	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	9.415.380	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp	-	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	-	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	93.617.180	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp	-	
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Rp	-	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	93.617.180	
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang Pembangunan Daerah	Rp	-	
		Pengelolaan data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	Rp	-	
		Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	Rp	-	
		Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	-	
2.		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	212.922.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	79.931.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	10.090.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	10.759.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	12.224.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	6.210.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	14.224.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		Asisten penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Rp	10.744.000	
		Pelaksanaan monitoring dan avaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Rp	7.840.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonis perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Rp	7.840.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	59.981.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	4.829.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	11.238.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Rp	9.000.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Rp	4.872.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	4.664.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	12.218.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Rp	10.000.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Rp	3.160.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	73.010.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	13.267.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Rp	10.811.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Rp	20.400.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Rp	5.006.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	4.771.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	7.627.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Rp	8.600.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Rp	2.528.000	
3.		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	376.626.000	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp	-	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp	-	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp	-	
		Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan	Rp	-	
		Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang	Rp	-	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp	40.135.600	
		Penelitian dan Pengembangan bidang aspek aspek sosial	Rp	40.135.600	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp	105.990.000	
		Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Rp	-	
		Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum	Rp	-	
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Rp	105.990.000	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	230.500.400	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	167.435.200	
		Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang fusi inovasi dan penerapan teknologi	Rp	-	
		Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Rp	-	
		Sosialisasi dan disemilasi hasil-hasil kelitbangan	Rp	40.565.200	
		Fasilitas hak kekayaan intelektual	Rp	22.500.000	

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang**

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Pembangunan				Rp 8.097.293.796				Rp 12.128.277.621
50101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 7.117.752.544	DAU		100%	Rp 10.361.500.000
50101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 69.071.000	DAU		100%	Rp 107.800.000
5010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp 18.096.000	DAU		2 Dokumen	Rp 19.800.000

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5010120102	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp 10.195.000	DAU		1 Dokumen	Rp 11.000.000
5010120103	Koordinasi dan Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp 10.195.000	DAU		2 Dokumen	Rp 1.650.000
5010120104	Koordinasi Penyusun DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp 10.195.000	DAU		1 Dokumen	Rp 8.250.000
5010120105	Koordinasi dan Penyusun Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp 10.195.000	DAU		1 Dokumen	Rp 8.250.000
5010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Singkawang	5 Laporan	Rp 10.195.000	DAU		5 Laporan	Rp 27.500.000
5010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	0 laporan	Rp -	DAU		3 Laporan	Rp 16.500.000
50101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 3.466.197.786	DAU		100%	Rp 4.426.192.159
5010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	Kota Singkawang	29 Orang/Bulan	Rp 3.196.220.786	DAU		29 Orang/Bulan	Rp 4.052.192.159
5010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ASN	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp 265.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp 330.000.000

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	DU	1 Dokumen	Rp	16.500.000
5010120204	Koordinasi dan Pelaksaaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	DAU	1 Dokumen	Rp	5.500.000
5010120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	4.977.000	DAU	1 Laporan	Rp	5.500.000
5010120206	Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	DAU	1 Dokumen	Rp	5.500.000
5010120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp	-	DAU	1 Laporan	Rp	5.500.000
5010120208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	DAU	1 Dokumen	Rp	5.500.000
50101203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Singkawang	100%	Rp	41.131.000	DAU	100%	Rp	88.000.000
5010120301	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp	4.883.000	DAU	2 Dokumen	Rp	16.500.000

5010120302	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp 5.500.000
5010120303	Koordinasi dan penilaian barang milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp 22.397.000	DAU		1 Laporan	Rp 22.000.000
5010120304	Pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp -	DAU		1 Laporan	Rp 11.000.000
5010120305	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp 4.617.000	DAU		1 Laporan	Rp 5.500.000
5010120306	Penatausahaan Barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp 9.234.000	DAU		1 Laporan	Rp 22.000.000
5010120307	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp 5.500.000
50101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 88.584.000	DAU		100%	Rp 138.500.000
5010120501	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Singkawang	0 Unit	Rp -	DAU		1 Unit	Rp 16.500.000
5010120502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Singkawang	2 Paket	Rp 88.584.000	DAU		2 Paket	Rp 100.000.000

5010120503	Pendataan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp 5.500.000
5010120504	Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp 5.500.000
5010120505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp 11.000.000
50101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 1.972.165.865	DAU		100%	Rp 1.355.188.944
5010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	Rp 20.000.000	DAU		1 Paket	Rp 75.500.000
5010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	Rp 150.000.000	DAU		1 Paket	Rp 77.000.000
5010120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kota Singkawang	1 Paket	Rp 24.000.000	DAU		1 Paket	Rp 70.500.000
5010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	Rp 10.930.900	DAU		1 Paket	Rp 100.000.000
5010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	Rp 20.000.000	DAU		1 Paket	Rp 100.500.000
5010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Singkawang	3 Dokumen	Rp 4.680.000	DAU		3 Dokumen	Rp 11.000.000

5010120607	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	Rp 9.995.500	DAU		1 Paket	Rp 11.000.000
5010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp 20.975.000	DAU		1 Laporan	Rp 100.000.000
5010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp 1.711.584.465	DAU		1 Laporan	Rp 800.681.105
5010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp 3.507.841
5010120611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp 5.500.000
50101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 318.280.350	DAU		100%	Rp 1.808.318.895
5010120701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Kota Singkawang	0 Unit	Rp -	DAU		100%	Rp -
5010120702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Singkawang	0 Unit	Rp -	DAU		3 Unit	Rp -
5010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kota Singkawang	2 Unit	Rp 10.961.250	DAU		2 Unit	Rp 250.000.000
5010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	0 Unit	Rp -	DAU		35 Unit	Rp 430.000.000
5010120707	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	0 Unit	Rp -	DAU		12 Unit	Rp 100.000.000

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5010120708	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU	12 Unit	Rp	100.000.000
5010120709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU	0 Unit	Rp	378.318.895
5010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU	1 Unit	Rp	275.000.000
5010120711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Unit	Rp	307.319.100	DAU	1 Unit	Rp	275.000.000
50101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp	802.459.290	DAU	100%	Rp	917.500.000
5010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	500.000	DAU	1 Laporan	Rp	5.500.000
5010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	174.974.637	DAU	1 Laporan	Rp	430.000.000
5010120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp	-	DAU	0 Laporan	Rp	52.000.000
5010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	626.984.653	DAU	1 Laporan	Rp	430.000.000
50101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp	359.863.253	DAU	100%	Rp	1.423.500.000

5010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan pajaknya	Kota Singkawang	4 Unit	Rp	86.822.000	DAU		4 Unit	Rp	200.000.000
5010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU		4 Unit	Rp	60.500.000
5010120903	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU		12 Unit	Rp	121.000.000
5010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU		14 Unit	Rp	52.000.000
5010120906	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU		45 Unit	Rp	165.000.000
5010120907	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU		12 Unit	Rp	-
5010120908	Pemeliharaan Aset Tak Terwujud	Jumlah Aset Tak Terwujud Yang Dipelihara	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU		12 Unit	Rp	-
5010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Singkawang	0 Unit	Rp	-	DAU		1 Unit	Rp	275.000.000
5010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Singkawang	1 Unit	Rp	42.135.000	DAU		1 Unit	Rp	275.000.000
5010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Singkawang	1 Unit	Rp	230.906.253	DAU		1 Unit	Rp	275.000.000

50102	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPd	Kota Singkawang	100%	Rp	389.993.252	DAU		100%	Rp	993.951.621
50102201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPd	Kota Singkawang	100%	Rp	286.960.692	DAU		100%	Rp	659.000.000
5010220101	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPd (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-			2 Dokumen	Rp	70.000.000
5010220102	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp	46.156.376	DAU		1 Dokumen	Rp	55.000.000
5010120103	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Singkawang	1 Berita Acara	Rp	77.769.176	DAU		1 Berita Acara	Rp	80.000.000
5010220104	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	Kota Singkawang	0 Berita Acara	Rp	-	DAU		1 Berita Acara	Rp	100.000.000
5010220105	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1 Berita Acara	Rp	45.060.840	DAU		1 Berita Acara	Rp	177.000.000
5010220106	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Singkawang	0 Usulan	Rp	-	DAU		234 Usulan	Rp	60.000.000
5010220107	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPd)	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp	117.974.300	DAU		2 Dokumen	Rp	117.000.000

50102202	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 9.415.380	DAU		100%	Rp 125.751.621
5010220201	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp 9.415.380	DAU		2 Dokumen	Rp 35.000.000
5010220202	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Singkawang	0 Orang	Rp -			120 Orang	Rp 65.751.621
5010220203	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Singkawang	0 Buku	Rp -			1 Buku	Rp 25.000.000
5010220301	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 93.617.180	DAU		100%	Rp 164.200.000
5010220301	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp -	DAU		4 Laporan	Rp 50.000.000
5010220302	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang Koordinasikan Pelaksanaan	Kota Singkawang	0 Kerja Sama	Rp -	DAU		5 Kerja Sama	Rp 20.000.000
5010220303	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	4 Laporan	Rp 93.617.180	DAU		4 Laporan	Rp 94.200.000

50102204	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp	-	DAU		100%	Rp	45.000.000
5010220401	Pengelolaan data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah yang dikelola	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	DAU		1 Dokumen	Rp	15.000.000
5010220402	Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	DAU		1 Dokumen	Rp	15.000.000
5010220403	Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	DAU		1 Dokumen	Rp	15.000.000
50103	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD</p> <p>Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD</p> <p>Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD</p>	Kota Singkawang	100%	Rp	212.922.000	DAU		100%	Rp	772.826.000
50103201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan OPD Bidang Pemerintahan yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD/RKPD	Kota Singkawang	100%	Rp	79.931.000	DAU		100%	Rp	284.760.000

5010320101	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp	10.090.000	DAU		2 Dokumen	Rp	54.810.000
5010320102	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	9 Perangkat Daerah	Rp	10.759.000	DAU		9 Perangkat Daerah	Rp	13.230.000
5010320103	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	Kota Singkawang	9 Laporan	Rp	12.224.000	DAU		9 Laporan	Rp	13.230.000
5010320104	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintah	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	6.210.000	DAU		1 Laporan	Rp	44.730.000
5010320105	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPDN)	Kota Singkawang	3 Dokumen	Rp	14.224.000	DAU		3 Dokumen	Rp	31.500.000
5010320106	Asisten penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Singkawang	5 Perangkat Daerah	Rp	10.744.000	DAU		5 Perangkat Daerah	Rp	13.230.000

5010320107	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Singkawang	5 Perangkat Daerah	Rp	7.840.000	DAU		5 Perangkat Daerah	Rp	13.230.000
5010320108	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonis perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan hasil sinkronasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	7.840.000	DAU		1 Laporan	Rp	100.800.000
50103202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan OPD Bidang Ekonomi dan SDA yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	Kota Singkawang	100%	Rp	59.981.000	DAU		100%	Rp	200.740.000
5010320201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp	4.829.000	DAU		2 Dokumen	Rp	54.180.000
5010320202	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kota Singkawang	4 Perangkat Daerah	Rp	11.238.000	DAU		4 Perangkat Daerah	Rp	13.230.000
5010320203	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Kota Singkawang	4 Perangkat Daerah	Rp	9.000.000	DAU		4 Perangkat Daerah	Rp	13.230.000

5010320204	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	4.872.000	DAU		1 Laporan	Rp	51.430.000
5010320205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp	4.664.000	DAU		1 Dokumen	Rp	13.230.000
5010320206	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kota Singkawang	5 Perangkat Daerah	Rp	12.218.000	DAU		5 Laporan	Rp	11.386.000
5010320207	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kota Singkawang	1 Perangkat Daerah	Rp	10.000.000	DAU		1 Perangkat Daerah	Rp	13.230.000
5010320208	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	3.160.000	DAU		1 Laporan	Rp	23.310.000
50103203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	Kota Singkawang	100%	Rp	73.010.000	DAU		100%	Rp	287.326.000
5010220301	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp	13.267.000	DAU		2 Dokumen	Rp	69.300.000

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5010220302	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Singkawang	5 Perangkat Daerah	Rp 10.811.000	DAU		5 Perangkat Daerah	Rp 13.230.000
5010220303	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Singkawang	5 Perangkat Daerah	Rp 20.400.000	DAU		5 Perangkat Daerah	Rp 16.380.000
5010220304	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp 5.006.000	DAU		1 Laporan	Rp 100.800.000
5010220305	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Singkawang	2 Dokumen	Rp 4.771.000	DAU		2 Dokumen	Rp 44.100.000
5010220306	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kota Singkawang	5 Perangkat Daerah	Rp 7.627.000	DAU		5 Perangkat Daerah	Rp 11.386.000
5010220307	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kota Singkawang	5 Perangkat Daerah	Rp 8.600.000	DAU		5 Perangkat Daerah	Rp 13.230.000
5010220308	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp 2.528.000	DAU		1 Laporan	Rp 18.900.000

505	Penelitian Pengembangan	Persentase Penelitian Pengembangan	Kota Singkawang	100%	Rp 376.626.000	DAU		100%	Rp 511.020.000
50502	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp 376.626.000	DAU		100%	Rp 511.020.000
50502201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Adanya Peningkatan Capaian Kinerja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Singkawang	100%	Rp -	PAD		100%	Rp 50.000.000
5050220102	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp -	PAD		1 Laporan	Rp 20.000.000
5050220112	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp -	PAD		1 Laporan	Rp 10.000.000
5050220114	Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan	Jumlah laporan hasil Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp -	PAD		1 Laporan	Rp 10.000.000

5050220115	Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp	-	PAD	1 Laporan	Rp	10.000.000
50502202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Adanya Peningkatan Capaian Kinerja pada Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Singkawang	100%	Rp	40.135.600	PAD	100%	Rp	-
5050220201	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek aspek sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan aspek-aspek sosial	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp	40.135.600	PAD	1 Dokumen	Rp	-
50502203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Singkawang	100%	Rp	105.990.000	PAD	100%	Rp	-
5050220307	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	PAD	0 Dokumen	Rp	-
5050220309	Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum	Kota Singkawang	0 Dokumen	Rp	-	PAD	0 Dokumen	Rp	146.020.000
5050220310	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp	105.990.000				

50502204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Komunikasi	Kota Singkawang	100%	Rp	230.500.400	PAD		100%	Rp	315.000.000
5050220401	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp	167.435.200	PAD		1 Dokumen	Rp	235.000.000
5050220202	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang fusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang fusi inovasi dan penerapan teknologi	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp	-	PAD		1 Laporan	Rp	15.000.000
5050220203	Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Kota Singkawang	0 Laporan	Rp	-	PAD		1 Laporan	Rp	15.000.000
5050220204	Sosialisai dan disemilasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisai dan disemilasi hasil-hasil kelitbangan	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	40.565.200	PAD		1 Laporan	Rp	40.000.000
5050220205	Fasilitas hak kekayaan intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitas hak kekayaan intelektual	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp	22.500.000	PAD		1 Laporan	Rp	10.000.000
TOTAL					Rp	8.097.293.796				Rp	12.639.297.621

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 69.071.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.18.096.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.10.195.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.10.195.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.195.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.195.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.195.000,00
 - **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 00
 2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.501.197.786,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.196.220.786,00
 - **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 265.000.000,00
 - **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.977.000,00
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 41.131.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.883.000,00
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 22.397.000,00
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.617.000,00
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.234.000,00
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 88.584.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 88.584.000,00
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Monotoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.067.165.865,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,00
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 24.000.000,00
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.930.000,00
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.680.000,00
 - Penyediaan Bahan/Material
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.995.500,00
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.975.000,00
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.711.584.465,00
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 488.280.350,00,
dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengadaan Mebel
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.961.250,00
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 307.319.100,00
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 802.459.290,00,
dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 500.000,00
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 174.974.637,00
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 626.984.653,00

8. Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 359.863.253,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kemdaraan Dinas Jabatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 86.822.000,00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
- Pemeliharaan Mebel
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 42.135.000,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 230.906.253,00

9. Penataan Organisasi

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00

- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
- **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
11. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.135.600,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.135.600,00
12. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan Pembangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.,105.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan hidup
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.,00

- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.,00
- Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.,105.990.000,00
- 13. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 230.500.400,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 167.435.200,00
 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.565.200,00
 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 22.500.000,00
- **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
- 14. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 286.960.692,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 46.156.376,00
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 77.769.176,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 45.060.840,00

- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 117.974.300,00
15. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.415.380,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.415.380,00
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
16. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 93.617.180,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 93.617.180,00
17. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00
 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00

- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 0,00

➤ **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

18. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 79.931.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.090.000,00

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.759.000,00

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 12.224.000,00

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.210.000,00

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 14.224.000,00

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.744.000,00

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 7.840.000,00

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 7.840.000,00

19. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 59.981.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.829.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 11.238.000,00
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.000.000,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.872.000,00
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.664.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 12.218.000,00
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.00.000,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.160.000,00
20. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 73.010.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 13.267.000,00
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.811.000,00
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.400.000,00
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastuktur
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.006.000,00
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4771.000,00
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 7.627.000,00
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.600.000,00
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.528.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Bappeda harus sama dengan yang tertuang dalam Renstra Bappeda sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Singkawang, 03 Juli 2023

Pf. Kepala Bappeda Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST.,M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 197001051997031006